

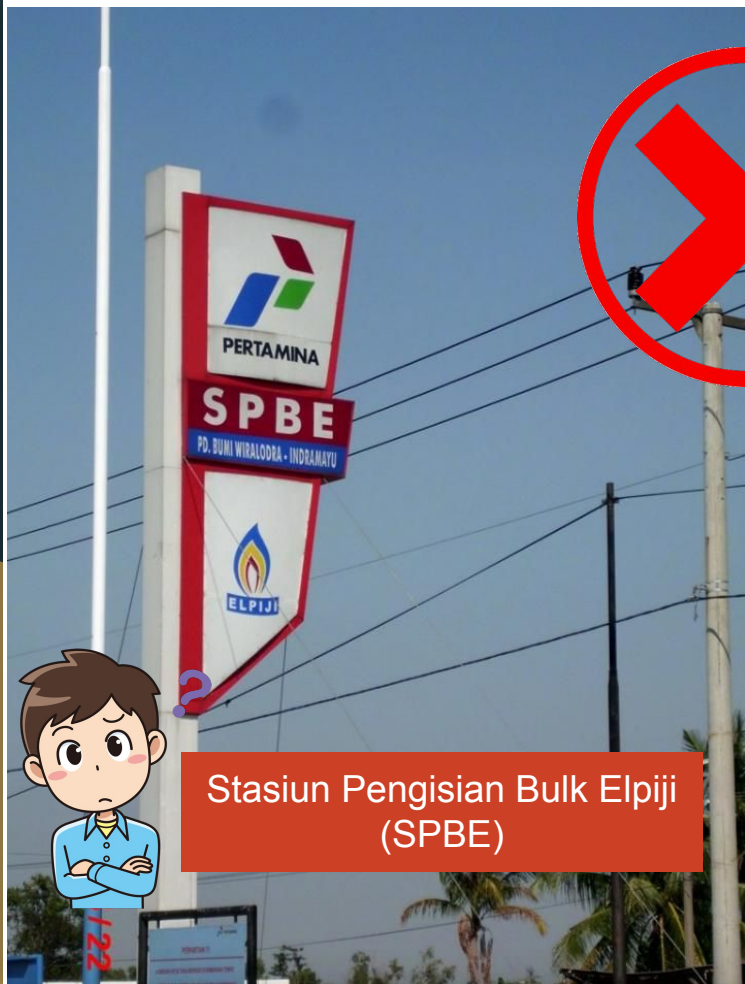


# Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE

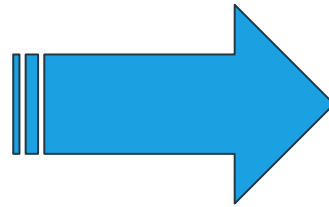
---

Selasa, 26 Oktober 2021

Nanang Ruswianto, S.T, M.Kom (Evaluator Eksternal SPBE - UGM)



Stasiun Pengisian Bulk Elpiji  
(SPBE)



Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan **teknologi informasi dan komunikasi** untuk **memberikan layanan** kepada **Pengguna SPBE**  
(PERPRES 95 Tahun 2018)

# LATAR BELAKANG: PEMBANGUNAN SPBE

1

Terjadi pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi mengingat setiap K/L/D membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri

- Masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif



2

BELANJA TIK PEMERINTAH  
(DALAM TRILIUN RUPIAH)



TOTAL BELANJA (2014 – 2016)  
(Pusat + Daerah) **12,7 T**

Sumber: Kemenkeu (Dirjen Perbendaharaan), 2017 (diolah)

65%  
Aplikasi Umum



35%  
Aplikasi Khusus

Sumber: Wantiknas, 2016

## Dampak Berantai

- Pemborosan anggaran, belanja TIK selalu bertambah setiap tahunnya, akan tetapi utilitas TIK hanya mencapai 30%
- Disintegrasi Sistem Informasi Pemerintah
- Risiko keamanan informasi
- Validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya

3

Sumber Paparan :Dr.Eng. Imam Machdi, M.T.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



**#1. world in  
your hand**

**#2. sensor in  
your hand**







# KONDISI PENERAPAN SPBE SAAT INI

Deskripsi	2019	2020	Peningkatan
<b>Indeks SPBE Nasional</b>	<b>2,18</b>	2,26	0,08
Indeks Domain Kebijakan	1,95	2,07	0,12
Indeks Domain Tata Kelola	1,87	1,95	0,08
Indeks Domain Layanan	2,40	2,48	0,08
<b>Jumlah IP Berpredikat "Baik" atau lebih tinggi</b>	196 IP (30,77%)	256 IP (40,19%)	60 IP (9,42%)

**INDEKS SPBE NASIONAL**

## PERPRES SPBE

### Tujuan SPBE



Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel



Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya



Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE

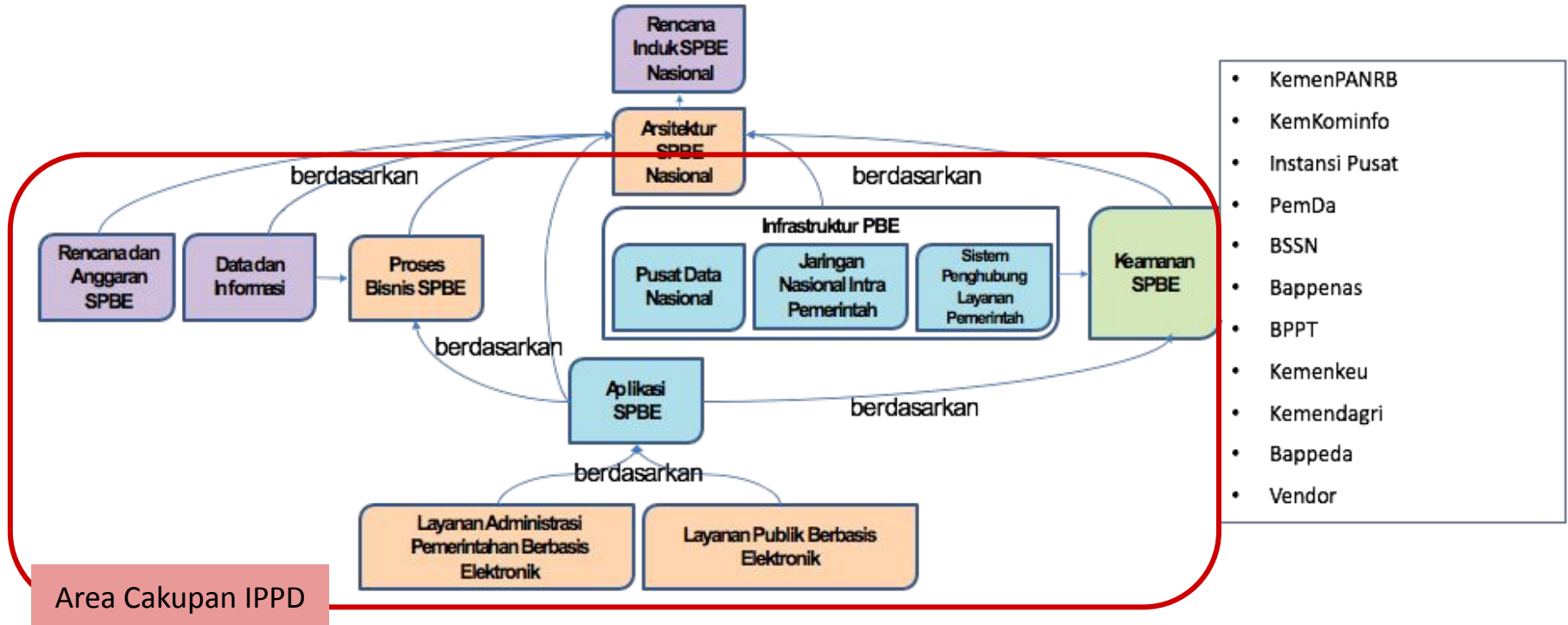
## 01



### Penguatan Kebijakan

- Permen PANRB 5/2020 tentang Manajemen Risiko SPBE
- Permen PANRB 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Rancangan Arsitektur SPBE Nasional
- Rancangan Peta Rencana (Roadmap) SPBE Nasional
- RPM Kominfo tentang Interoperabilitas Data
- RP BSSN tentang Keamanan Informasi
- RPM Kominfo tentang Audit TIK
- RP BSSN tentang Audit Keamanan
- RP BPPT tentang Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE

# KETERPADUAN ANTAR UNSUR SPBE



Sumber Paparan :Dr.Eng. Imam Machdi, M.T.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



# TAHAPAN PENERAPAN SPBE NASIONAL

## Tahap pembangunan fondasi SPBE (2018 - 2022)

## Tahap pengembangan SPBE (2023 - 2025)

1. Rata-rata indeks SPBE 2,26 (*Cukup*)
2. Peringkat EGDI Indonesia – 88
3. Pelaksanaan clearance investasi TIK (aplikasi dan infrastruktur TIK TA 2021)
4. Penguatan kebijakan SPBE:
  - a. PermenPANRB Manajemen Risiko SPBE
  - b. PermenPANRB Evaluasi SPBE
  - c. PermenPPN/Bappenas Manajemen Data

### Rencana:

- a. Penetapan Arsitektur SPBE Nasional
- b. Penetapan Peta Rencana SPBE Nasional 2021 – 2025
- c. Penguatan kebijakan SPBE
- d. Penelaahan anggaran SPBE TA 2022
- e. Pelaksanaan evaluasi SPBE 640 K/L/D

1. Tahap awal implementasi, konsolidasi penerapan SPBE K/L/D
2. Rata-rata indeks SPBE 2,18 (*Cukup*)

- 2 Oktober 2018 Penetapan Perpres SPBE
- Peringkat e-Govt Development Index (EGDI) Indonesia – 107
- penguatan tata kelola SPBE dengan membangun kepemimpinan melalui pembentukan Tim Koordinasi SPBE

### TARGET RPJMN 2024

Jumlah K/L/D yang menerapkan SPBE dengan rata-rata indeks SPBE Baik

- 100% Instansi Pusat,
- 80% Pemerintah Provinsi,
- 50% Pemerintah Kab/Kota.

### FASE TRANSFORMASI menuju SMART Government

- Penyusunan **proses bisnis antar sasaran pembangunan lintas bidang/sector, dan antar K/L/D**, melalui penerapan Arsitektur SPBE
- Pemanfaatan infrastruktur TIK Nasional Berbagi Pakai (PDN, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan)
- Mewujudkan **tematik layanan**, fokus pembangunan lintas bidang/sector

### SMART Government

- Integrasi (*high level*) proses bisnis lintas K/L/D berbasis Arsitektur SPBE (*Government Enterprise Architecture*)
- Penerapan penuh layanan publik dan administrasi pemerintahan nasional dalam bentuk **layanan digital pemerintah terintegrasi**
- Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Artifisial dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat (*Data-Driven Government*)

PRAKTEK PEMERINTAHAN DINAMIS 2025

Sumber: Paparan Asdep Balaks, 2021



# GOVERNMENT AS A PLATFORM PERPRES SPBE



G2B dan G2C

G2G dan G2E

Layanan Publik  
Layanan Administrasi Pemerintahan

### Prinsip SPBE:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Interoperabilitas
4. Keterpaduan
5. Kestinambungan
6. Akuntabilitas
7. Keamanan

### People

**(Digital Literacy)**

- Promosi literasi SPBE
- Peningkatan kapasitas ASN
- Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dan non-Pemerintah

### Process (EA Nasional)

**Nasional**  
(Tim Koordinasi SPBE Nasional)

<b>Instansi Pusat</b> (Koord: Sekretaris Instansi Pusat)	<b>Pemerintah Daerah</b> (Koord: Sekretaris Daerah)
---	--

### Technology

Keamanan Informasi	Aplikasi Umum	Aplikasi Khusus	Sistem Manajemen
	Data (Data Architect)		
	Integration (ESB)		
	Network (Jaringan Intra Pemerintahan)		
	Platform (Pusat Data Nasional)		

### Tim Koordinasi SPBE Nasional:

1. Dibawah langsung Presiden
2. Ketua : Menpan RB
3. Anggota:
  - a. Mendagri
  - b. Menkeu
  - c. Menkominfo
  - d. Bappenas
  - e. Ka. BSSN
  - f. Ka. BPPT
4. Melibatkan Menteri/ kepala lembaga terkait

### Manajemen



Kemenpan RB:
Bappenas
Kemenkominfo
BPPT
BSSN

- Reviu arsitektur SPBE
- Penyelarasan dengan Pemda
- Menetapkan aplikasi umum

# MODEL GENERIK: TIM KOORDINASI SPBE K/L/D

## Sekretaris

- Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan layanan pemerintahan
- Mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemda lain

## Organisasi dan Tata Laksana

- Mengoordinasikan integrasi proses bisnis di K/L/D
- Mengelola arsitektur bisnis
- Mengelola layanan

## Keuangan

- Mengkoordinasikan penganggaran SPBE Pemda

## Dewan TIK Daerah / Perguruan Tinggi

- Memberikan rekomendasi arah pembangunan TIK
- Optional



## TIK / Kominfo

- Mengelola Arsitektur SPBE
- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK
- Penerapan keamanan SPBE
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan

## Perencanaan

- Mengoordinasikan perencanaan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data

## Unit Sektor

- Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE di K/L/D
- Mengelola kebutuhan layanan SPBE

**SPBE Bukan Hanya Kepentingan Dinas Kominfo**

Sumber Paparan :Dr.Eng. Imam Machdi, M.T.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



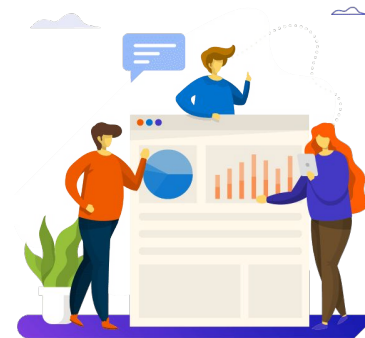


# Komponen SPBE

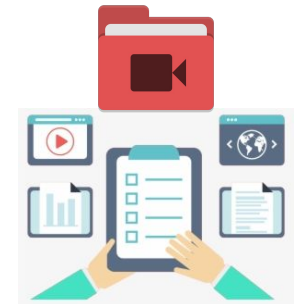
1. **Layanan SPBE**
2. **Proses Bisnis**
3. **Data dan Informasi**
4. **Aplikasi SPBE**
5. **Infrastruktur SPBE**
6. **Keamanan SPBE**
7. **Arsitektur SPBE** (Meliputi : 1-6  
Komponen diatas dan keterkaitannya)
8. **Manajemen SPBE**
9. **Penyelenggara / SDM SPBE**
10. **Peta Rencana**
11. **Rencana dan Anggaran**
12. **Kebijakan Internal**
13. **Pemantauan dan Evaluasi**
14. **Audit TIK**



**KEBIJAKAN  
INTERNAL**



**MONEV BERKALA  
Internal & Eksternal**



**DOKUMENTASI  
(Repository)**



# LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI SPBE



**PERPRES 95/2018**

**PERMENPANRB 5/2018**

Pedoman **Evaluasi SPBE** digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian/evaluasi SPBE untuk **mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



## REVISI TERHADAP PERMENPANRB 5/2018

PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 terbit lebih dulu (9 bulan 11 hari) sebelum Perpres 95 Tahun 2018 terbit.

Beberapa **amanat** Perpres 95 Tahun 2018 yang **belum terakomodasi** dalam PermenPANRB No. 5 Tahun 2018, antara lain:

- Arsitektur SPBE (Pasal 6–12)
- Peta Rencana SPBE (Pasal 13–19)
- Jaringan Intra Pemerintah (Pasal 32)
- Sistem Penghubung Layanan (Pasal 33)
- Pembangunan Aplikasi Terpadu (Pasal 34–39)
- Keamanan SPBE (Pasal 40–41)
- Manajemen SPBE: Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Layanan, Manajemen SDM SPBE, Manajemen Perubahan, Manajemen Pengetahuan (Pasal 46–54)
- Audit TIK: Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur, Audit Keamanan (Pasal 55–58)

# INSTRUMEN EVALUASI SPBE 2018-2020 vs 2021



EVALUASI  
SPBE 2018-2020

PERMENPAN 5/2018

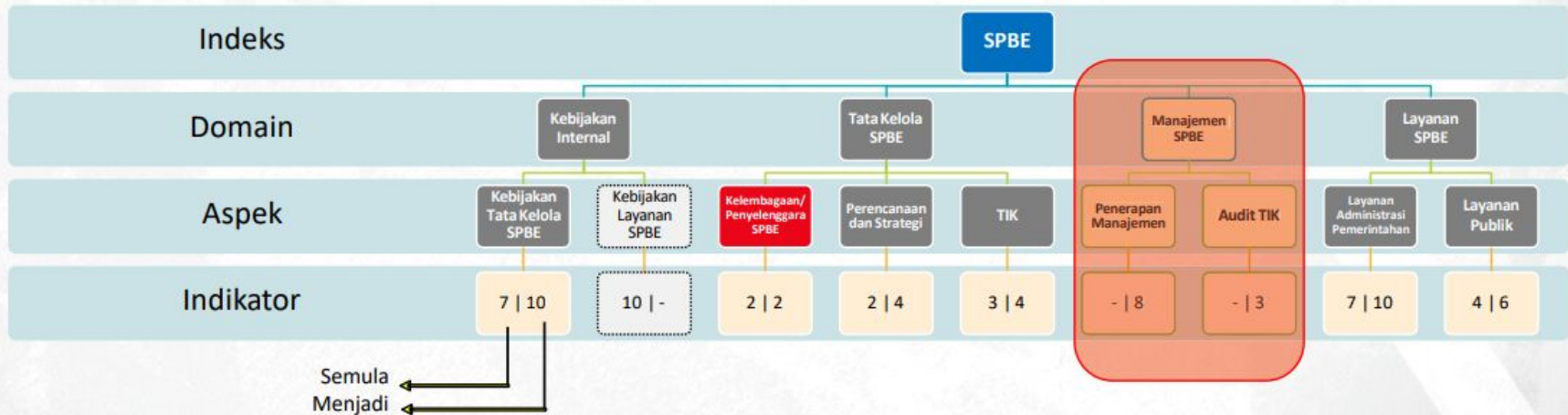
DOMAIN (3)  
ASPEK (7)  
INDIKATOR (35)



PEMANTAUAN & EVALUASI  
SPBE 2021

PERMENPAN 59/2020

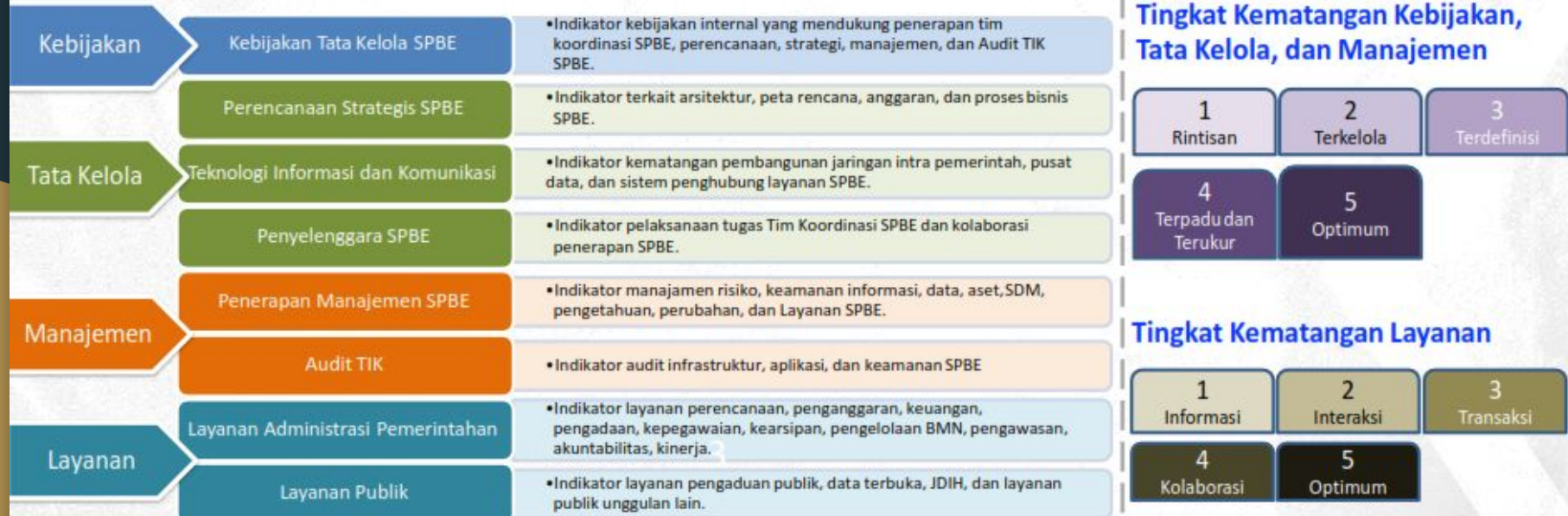
DOMAIN (4)  
ASPEK (8)  
INDIKATOR (47)



# METODOLOGI EVALUASI

METODOLOGI EVALUASI PERMENPANRB 59/2020

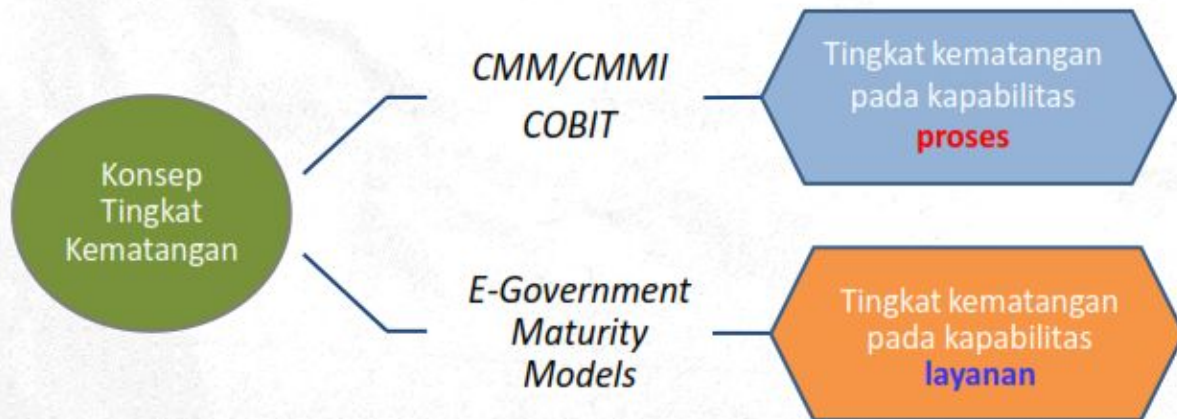
Mengukur tingkat kematangan (skala 1 - 5) pada indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE





# KONSEP TINGKAT KEMATANGAN

*PERMENPANRB 59/2020 menggunakan Konsep Penilaian Tingkat Kematangan sebagai berikut:*



Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

- 1) Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).\*
- 2) Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
- 3) Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
- 4) Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
- 5) Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

*\*) Pada instrumen evaluasi SPBE sudah tidak ada lagi tingkat kematangan 0, sehingga kondisi tersebut akan diberikan nilai 1.*



# KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN

## KRITERIA UMUM TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS PROSES

### 1. Rintisan

- Kebijakan internal masih berbentuk konsep atau rancangan kebijakan.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.

### 2. Terkelola

- Kebijakan internal telah ditetapkan namun belum mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, serta baru dilaksanakan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.

### 3. Terdefinisi

- Kebijakan internal telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh semua unit organisasi terkait dan dilaksanakan sesuai pedoman/standar.

### 4. Terpadu dan Terukur

- Kebijakan internal yang ditetapkan telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan terpadu dengan proses tata kelola lain dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi.

### 5. Optimum

- Kebijakan yang ditetapkan telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dengan menetapkan kebijakan baru.
- Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

# KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN

## KRITERIA UMUM TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS LAYANAN

### 1. Informasi

- Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.

### 2. Interaksi

- Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.

### 3. Transaksi

- Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.

### 4. Kolaborasi

- Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.

### 5. Optimum

- Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.



# PENGHITUNGAN BOBOT

Domain dan Aspek Penilaian	Instrumen Sebelumnya		Instrumen Baru	
	Jumlah Indikator (35)	Bobot (100%)	Jumlah Indikator (47)	Bobot (100%)
<b>Domain 1- Kebijakan Internal Terkait SPBE</b>	17	17%	10	13%
Aspek 1- Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE				13%
<b>Domain 2 – Tata Kelola SPBE</b>	7	28%	10	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis SPBE				10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi				10%
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE				5%
<b>Domain 3 – Manajemen SPBE</b>	-	-	11	16,5%
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE				12%
Aspek 6 – Audit TIK				4,5%
<b>Domain 4 – Layanan SPBE</b>	11	55%	16	45,5%
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik				27,5%
Aspek 8 – Layanan Pengaduan Pelayanan Publik				18%



# AGENDA/TAHAPAN (TENTATIVE) PELAKSANAAN EVALUASI SPBE TAHUN 2021





# PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

mendapatkan **gambaran secara umum** tentang penerapan SPBE pada setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta memperluas **jejaring dan pembinaan** penerapan SPBE.



Sumber: Paparan Deputi KemenpanRB, 2021

## 25 Kampus Evaluators & 7 Instansi Pusat

# ARSITEKTUR SPBE

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi

Panduan integrasi bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun

Arsitektur SPBE  
Nasional

Arsitektur SPBE  
Instansi Pusat

Arsitektur SPBE  
Pemda

# MANFAAT ARSITEKTUR SPBE



1

Mengurangi tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan

2

Mengurangi duplikasi infrastruktur dan sistem aplikasi

3

Menerapkan standardisasi TIK

4

Berbagi data dan informasi

5

Memudahkan integrasi layanan SPBE

6

Meningkatkan efisiensi biaya SPBE



# Arsitektur (Layer 1) SPBE NASIONAL



Referensi  
Arsitektur

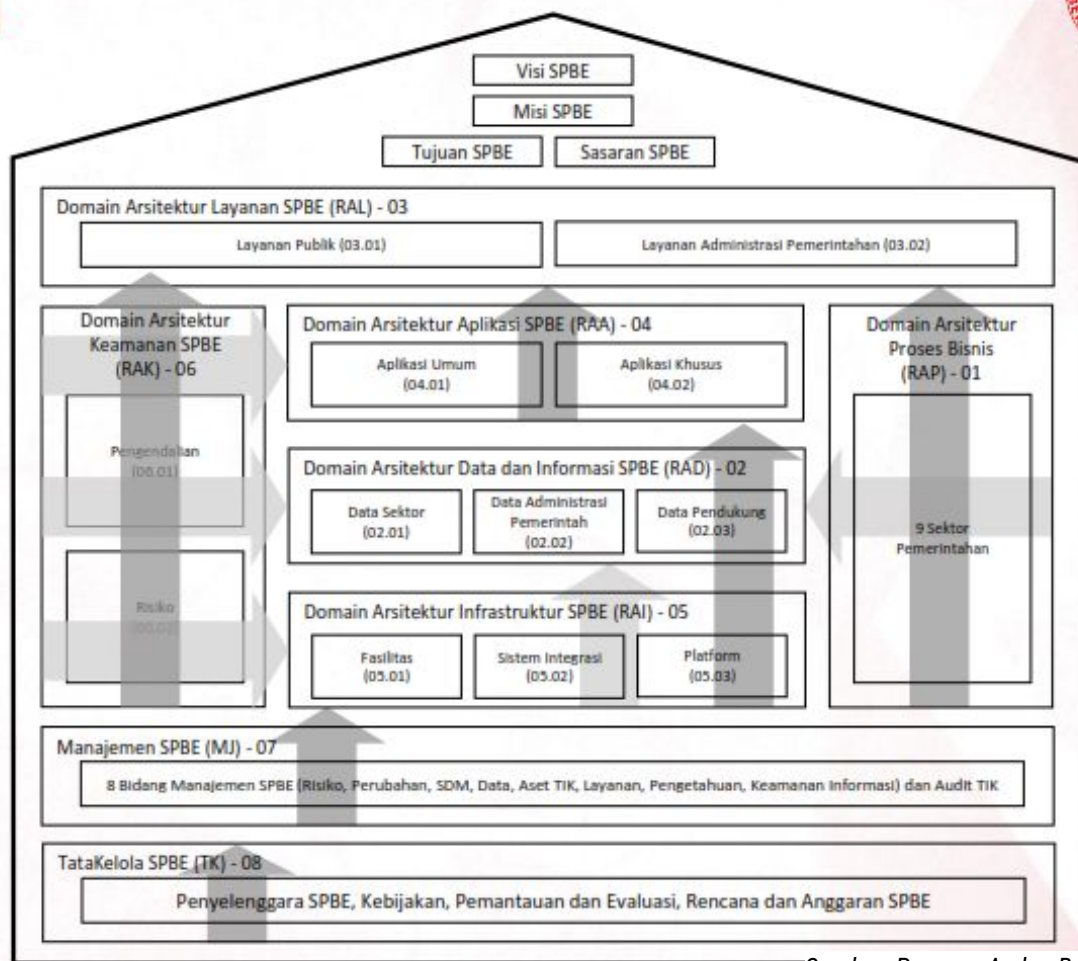
Domain  
Arsitektur

Model  
Metadata  
Arsitektur

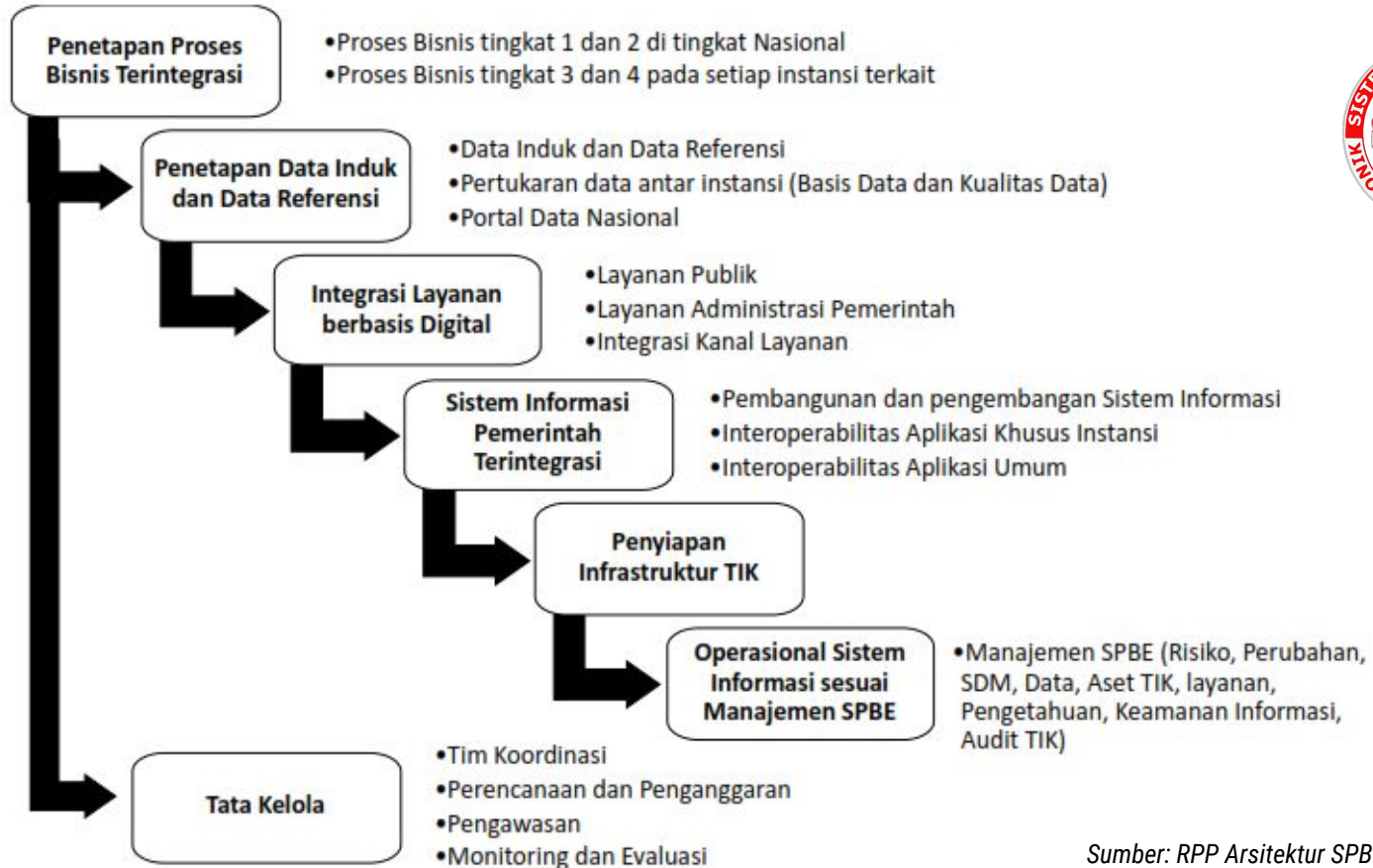
Mewujudkan **tata Kelola pemerintahan** yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel

Mewujudkan **pelayanan publik** yang berkualitas dan terpercaya

Meningkatkan **keterpaduan** dan efisiensi penyelenggaraan SPBE



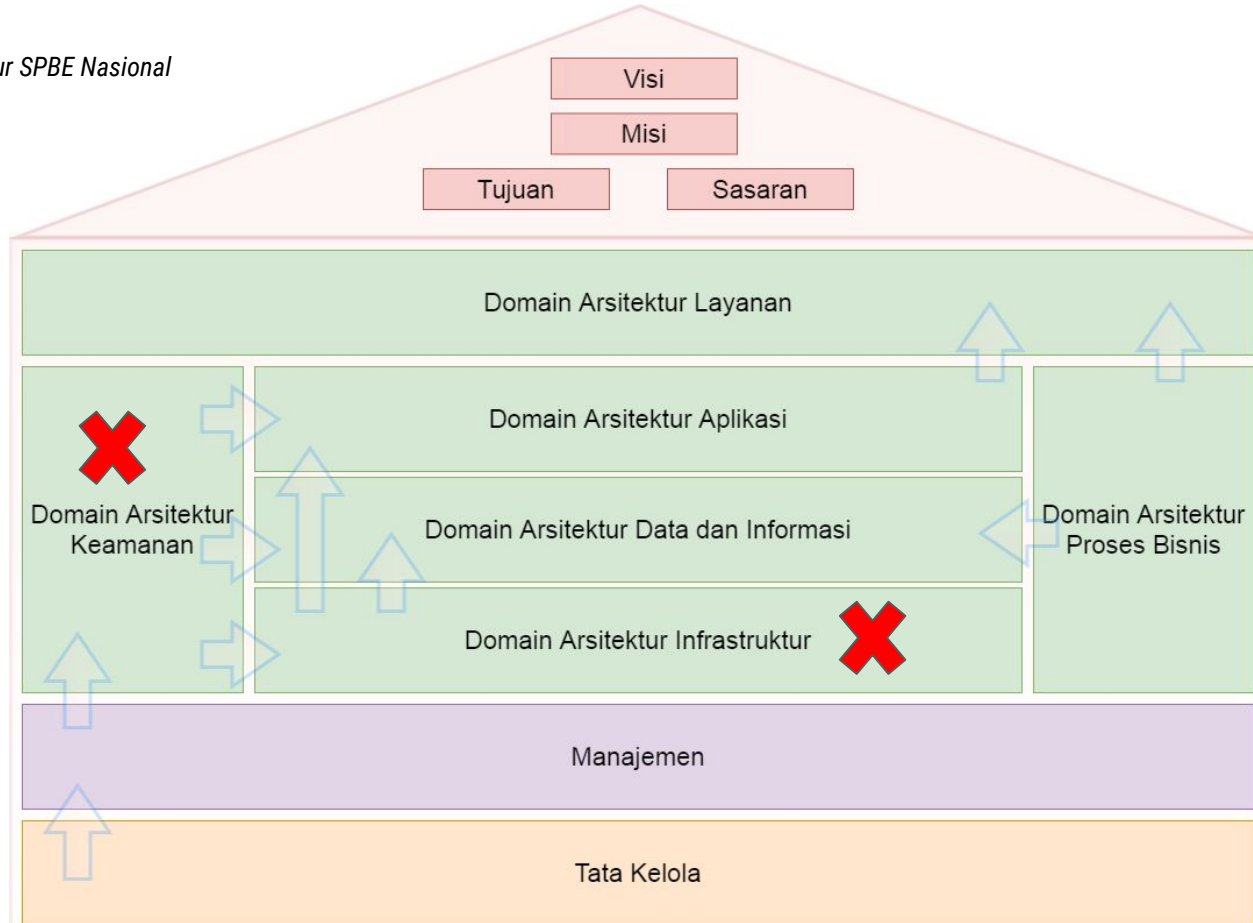
# Tahapan Penyiapan Layanan Pemerintah Daerah



# Amanah Referensi Arsitektur SPBE untuk IPPD

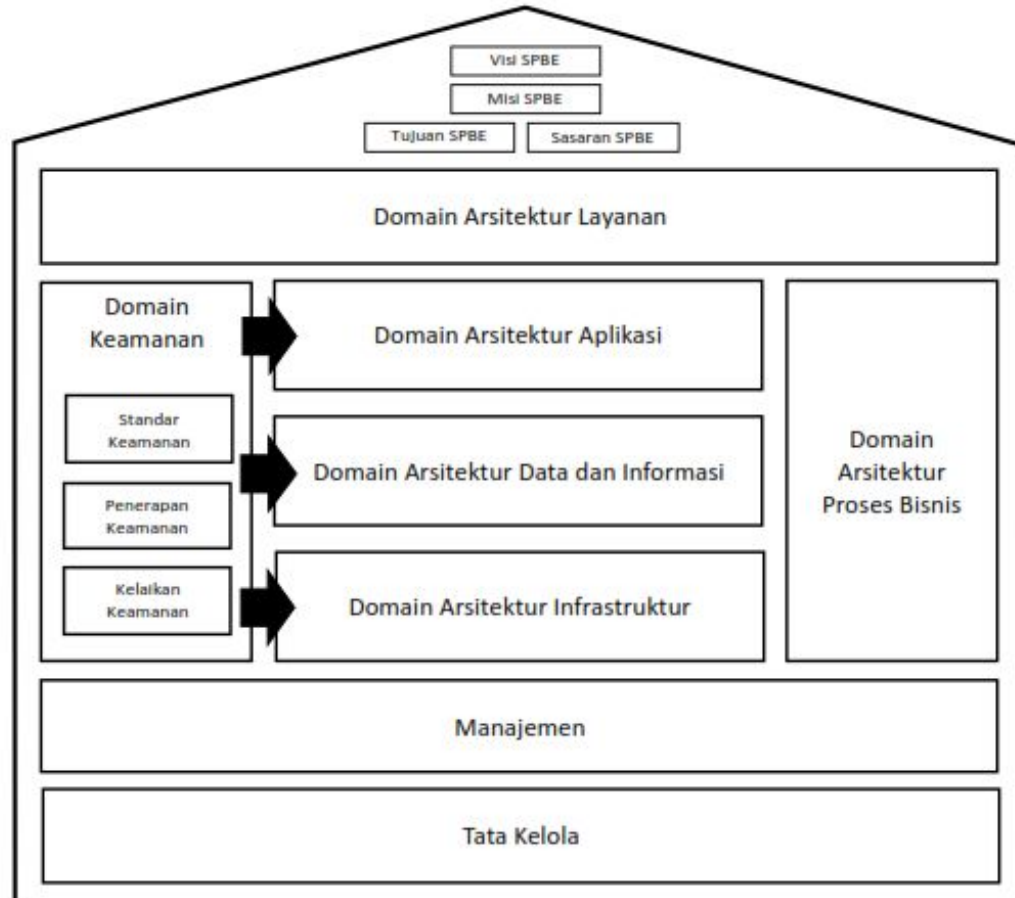


Mengikuti Ref Arsitektur SPBE Nasional

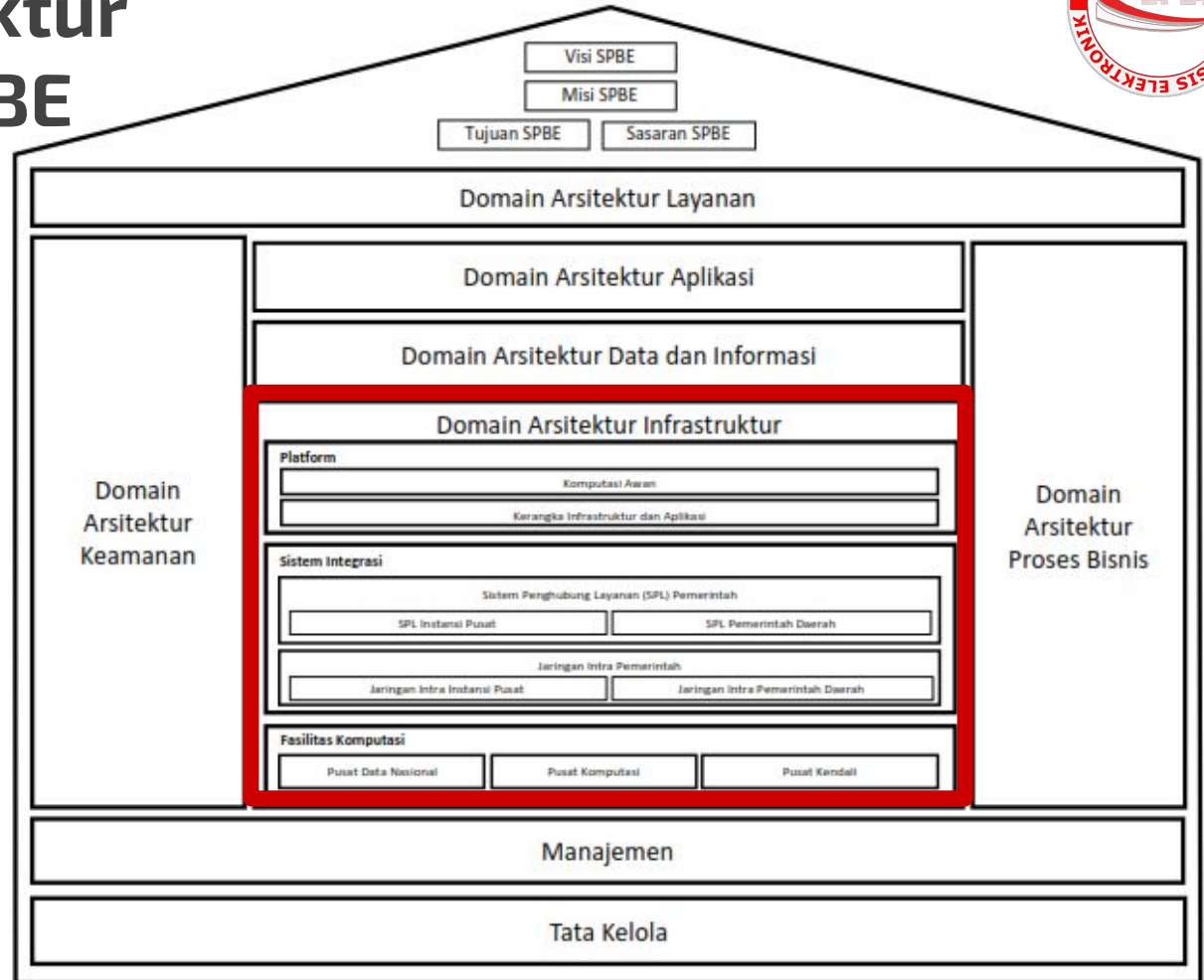




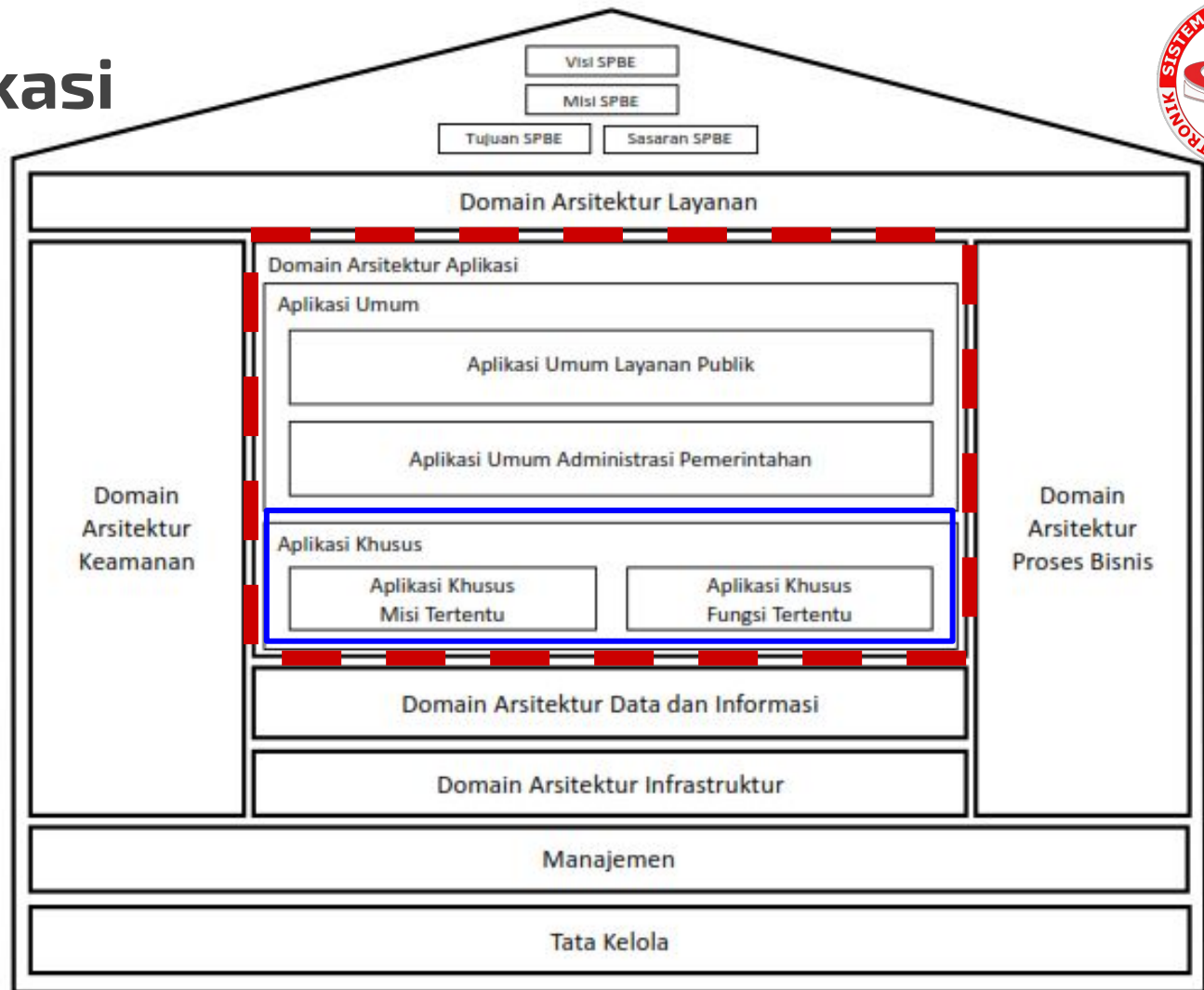
# Referensi Arsitektur Keamanan SPBE



# Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE



# Domain Aplikasi





# Master Plan SPBE Nasional (Perpres 95/2018)

Peta Rencana Strategis SPBE  
Nasional

## Tata Kelola

1. Pembangunan Arsitektur SPBE (2021) ★
2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE (2019)
3. Penguatan Kebijakan SPBE (2025)
4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE (2025)

## Layanan

1. Survei Penggunaan SPBE (2025)
2. Portal Pelayanan Publik yang terintegrasi (2025)
3. Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (2021) ★
4. Penyelenggara Manajemen Layanan (2021)

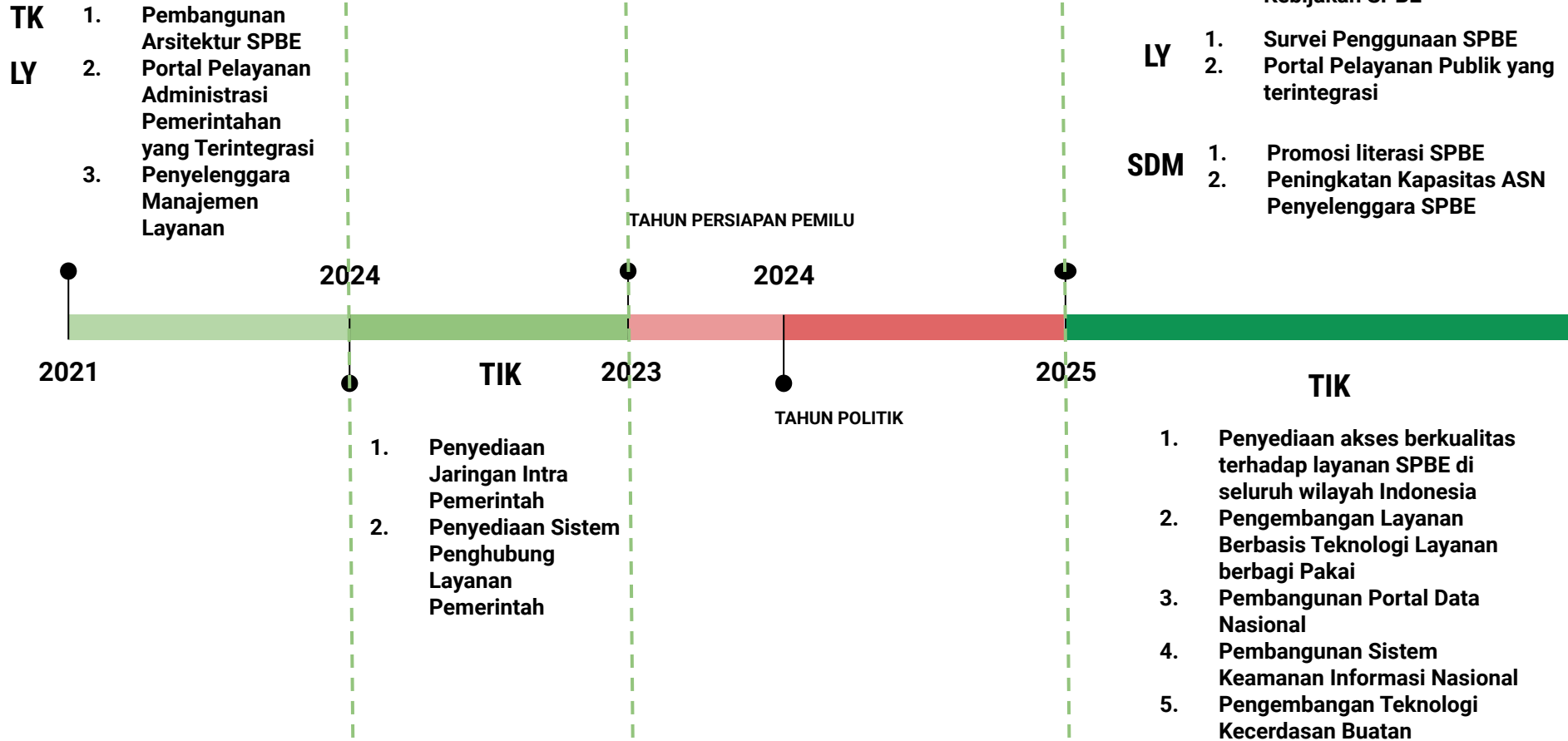
## TIK

1. Penyediaan Pusat Data Nasional (2022)
2. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah (2022)
3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (2022)
4. Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di seluruh wilayah Indonesia (2025)
5. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan berbagi Pakai (2025)
6. Pembangunan Portal Data Nasional (2025)
7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional (2025)
8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan (2025)

## SDM

1. Promosi literasi SPBE (2025)
2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE (2025)
3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah (2020) ★

# Peta Rencana SPBE

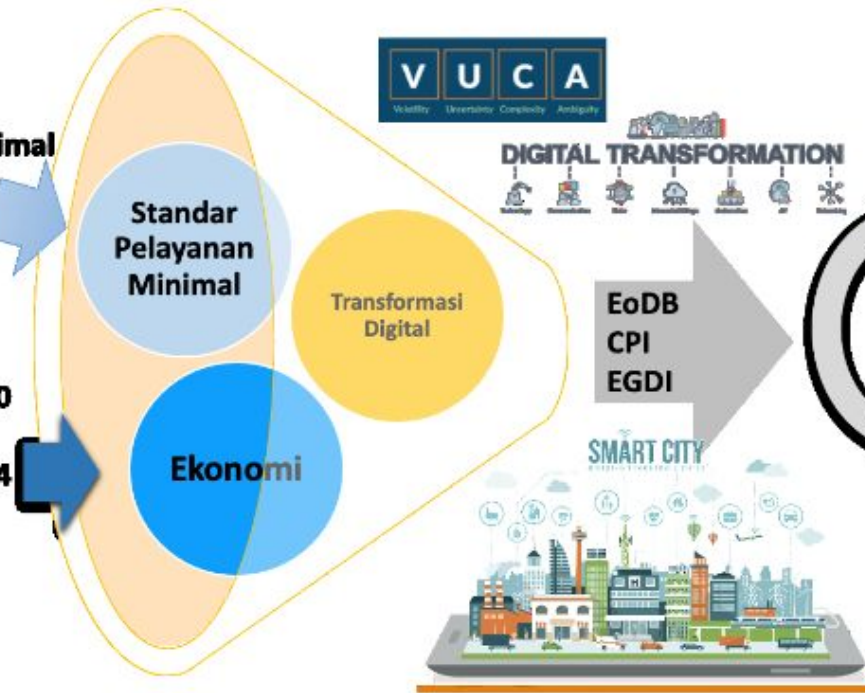


# Pola Tematik Layanan Pemerintah



PP No. 2 Tahun 2018  
Standar Pelayanan Minimal

UU No. 11 Tahun 2020  
Cipta Kerja  
UU No. 23 Tahun 2014  
Pemerintah Daerah



## Tematik Layanan Pemerintah

### Layanan Publik

#### A. SPM (Government to Citizen/G2C)

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

#### B. Layanan Bisnis (Government to Business/G2B)

1. Perdagangan
2. Perindustrian
3. Penyiaran
4. Kawasan Ekonomi
5. dll

### Layanan Administrasi Pemerintahan

- A. Akuntabilitas Kinerja
- B. Pengawasan
- C. Kepegawaian *Government to Government/G2G*
- D. Kearsipan *Government to Employee/G2E*
- E. BMN
- F. Keuangan (Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa)
- G. dll



# Tematik Layanan Pemerintah



## Layanan Publik

### A. SPM (*Government to Citizen/G2C*)

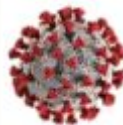
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

### B. Layanan Bisnis (*Government to Business/G2B*)

1. Perdagangan
2. Perindustrian
3. Penyiaran
4. Kawasan Ekonomi
5. dll

## Layanan Administrasi Pemerintah

- A. Akuntabilitas Kinerja
- B. Pengawasan
- C. Kepegawaian *Government to Government/G2G*
- D. Kearsipan *Government to Employee/G2E*
- E. BMN
- F. Keuangan (Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa)
- G. dll



Penanganan Covid-19

Pemulihan Ekonomi Nasional

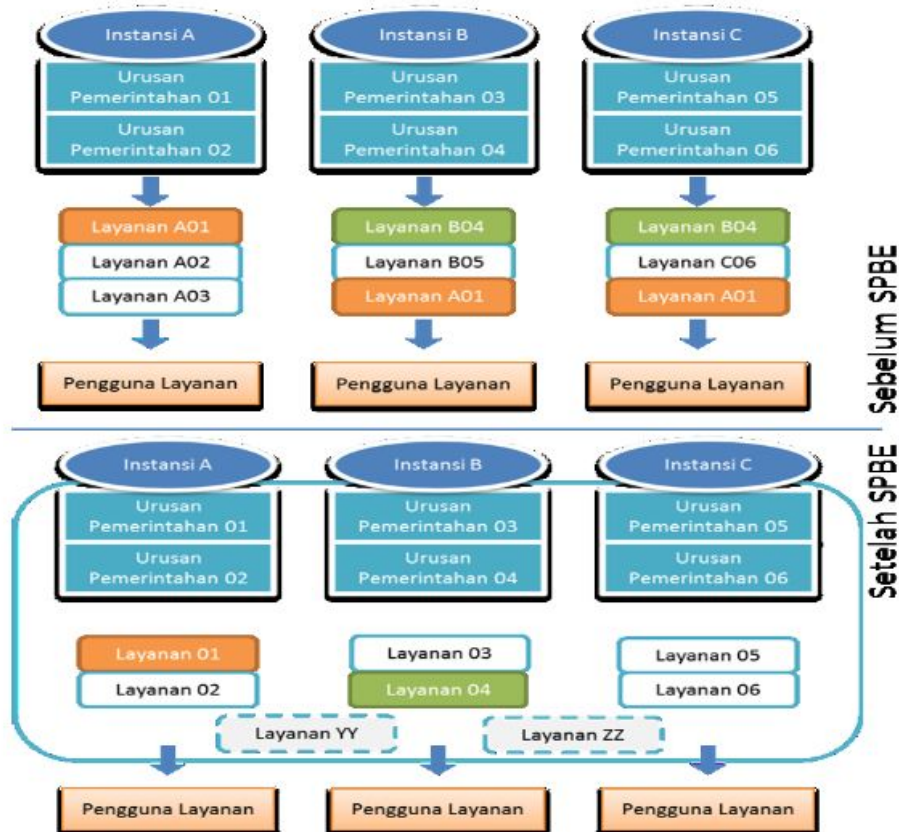
## Layanan Digital Pemerintah (Prioritas) :

1. Bantuan Pemerintah Terintegrasi (BPT)
2. Perizinan Pemerintah Terintegrasi (PPT)

CPI  
EoDB  
EGDI

DIGITAL  
**disruption**

# Pola Tematik Layanan Pemerintah

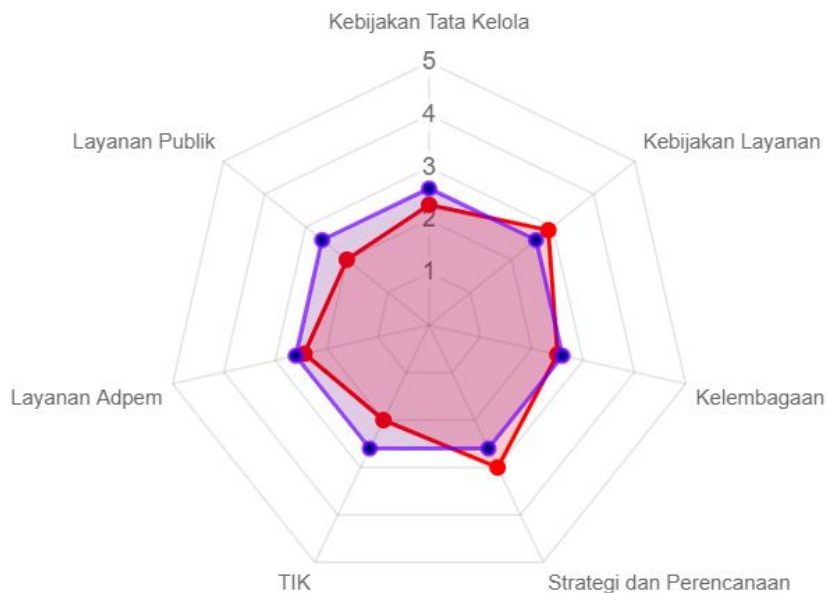




# Hasil Evaluasi SPBE 2019

## Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek

Aspek SPBE Target (purple line)    Aspek SPBE Indeks (red line)



Nama Instansi

**Pemerintah Kabupaten Bondowoso**

K/L/D : Kabupaten  
Daerah : Jawa Timur

**Indeks SPBE : 2.38**

Predikat SPBE : Cukup

**Domain Kebijakan SPBE : 2.65**

➔ Kebijakan Tata Kelola SPBE : 2.29

➔ Kebijakan Layanan SPBE : 2.9

**Domain Tata Kelola : 2.43**

➔ Kelembagaan : 2.5

➔ Strategi dan Perencanaan : 3.00

➔ TIK : 2.00

**Domain Layanan SPBE : 2.27**

➔ Administrasi Pemerintahan : 2.43

➔ Pelayanan Publik : 2.00



# PermenpanRB No 59 tahun 2020

Pemantauan dan Evaluasi SPBE

# Kepmen No. 962 tahun 2020

Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Pemantauan SPBE





# Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE Revisi	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE Sebelumnya
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	
Aspek 1	<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	X
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	X
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	X
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE



**17 → 10**  
**2 Lama**  
**8 Baru**

# Filosofi

Kebijakan

Tata Kelola

Manajemen

*"Nyuruh"-nya sudah benar?*

*Eksekusinya sudah benar?*



WHAT'S YOUR  
LEVEL OF UNDERSTANDING?

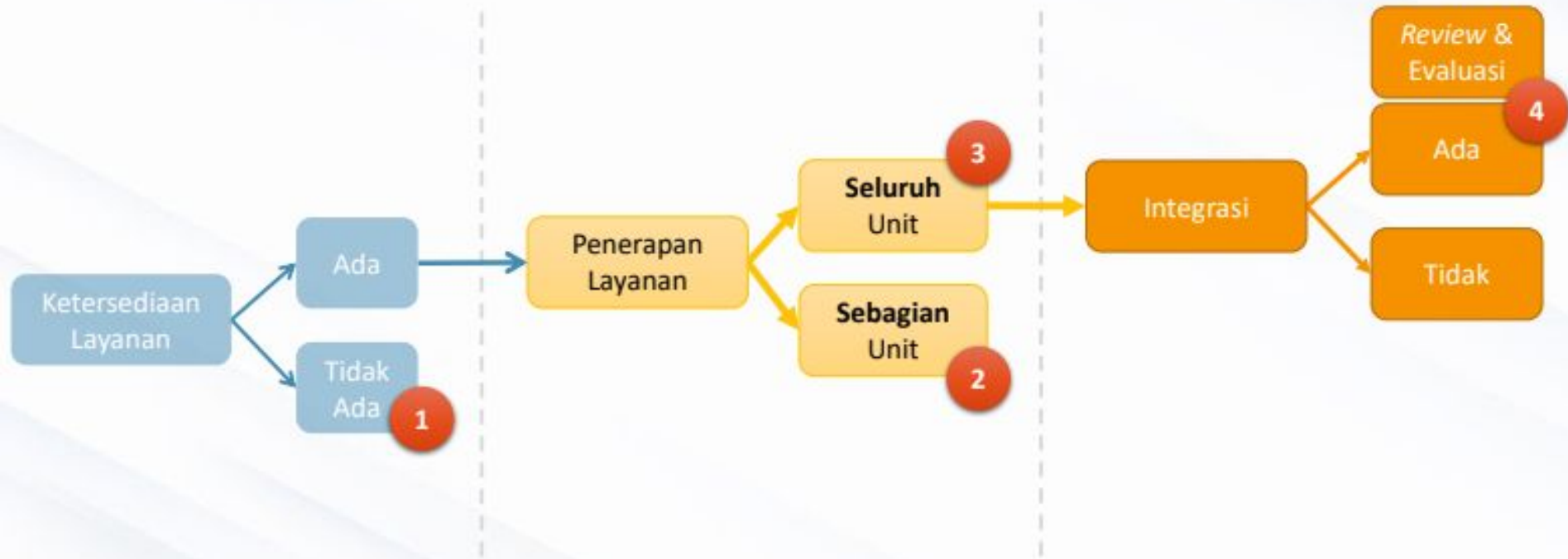


4 3 2 1 0

# Tingkat Kematangan dan *Evidence*



# Secara Umum







Mari Berdiskusi